

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian sejarah Gorontalo merupakan bagian dari penelitian sejarah lokal. Suatu penelitian yang bersifat lokal tidak hanya dilakukan untuk memperkaya perbendaharaan sejarah nasional, tapi lebih penting lagi akan memperdalam pengetahuan tentang dinamika sosiokultur masyarakat lokal terutama Gorontalo yang majemuk secara lebih intim. Melalui suatu proses merekonstruksi dengan menggunakan pendekatan multidimensional, akan diungkapkan kondisi masyarakat dalam konteks situasi historis di mana perubahan itu terjadi. Harus diakui bahwa pembentukan dan pembinaan identitas suatu bangsa tidak mungkin di pisahkan dari kesadaran suatu bangsa terhadap perjalanan sejarahnya.

Hal ini pula yang terjadi di daerah Kabupaten Pohuwato. Sebuah daerah yang merupakan bagian dari Provinsi Gorontalo ini menyimpan beragam sejarah lokal yang patut untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia secara umum (terutama masyarakat Jawa) dan masyarakat Gorontalo secara khusus. Sejarah lokal sangat penting untuk ditulis, karena sejarah lokal sangat menarik karena “mengungkapkan soal – soal kemanusiaan secara khusus dan mempunyai makna tertentu”. Makna inilah yang kemudian dapat menjadikan eksistensi dari sejarah lokal tersebut menjadi kuat untuk diteliti (Sartono Kartodirdjo,1992:87). Maka dari itu sejarah lokal

sangatlah penting untuk diteliti, hal ini karena peristiwa tersebut memiliki makna yang sangat penting.

Pentingnya meneliti sejarah lokal karena ketika kita akan meneliti kita akan lebih melihat pada sisi yang lebih manusiawi dalam hal “pentingnya” penulisan sejarah lokal. Sisi manusiawi yang dimaksud adalah, pada hakikatnya dalam penulisan sejarah lokal, seorang peneliti lebih berhadapan dengan “manusia” secara langsung dan intim. Manusia yang dimaksud disini merupakan manusia dalam lokalitas desa ataupun daerah tertentu (yang menjadi objek penelitian), bukan hanya dihadapkan oleh tokoh – tokoh besar dari peristiwa besar. Sehingga apa yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah tentang penelitian sejarah lokal sangat berbeda dengan penulisan sejarah yang hanya memuat unsur politik saja (gaya penulisan konvensional) yang lebih menekankan pada penulisan sejarah orang – orang besar atau suatu dinasti tertentu (Taufik Abdullah, 1990:19).

Penekanan “makna” dan lebih ke dalam “masyarakat” secara kolektif, sangat di tonjolkan dalam penelitian sejarah lokal. Karena tanpa adanya indikator – indikator tersebut, maka sejarah lokal tidak akan jadi apa – apa dan tidak memiliki kegunaan yang signifikan untuk diteliti maupun ditulis. Oleh karena itu seorang peneliti harus memperhatikan kondisi dari daerah yang akan dijadikan sebagai kajiannya sebelum menetapkan daerah tersebut sebagai objek dalam penelitiannya nanti. Di lihat dari pentingnya dalam mengangkat sejarah lokal memang sangat sesuai daerah yang menjadi objek penelitian penulis. Selain itu, pentingnya sejarah lokal juga sangat berpengaruh bagi kelangsungan sejarah Nasional, karena kedudukan sejarah Nasional

sangat bergantung pada beragamnya sejarah lokal yang terjadi di berbagai daerah (walaupun kemudian akan dilakukan filter, sejarah lokal yang mana yang harus dimasukan kedalam sejarah Nasional).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa di Kabupaten Pohuwato memilikisuatu perjalanan historis yang sangat unik. Terutama jika dilihat dari keberagaman suku ataupun etnik yang mendiami wilayah ini. etnik yang datang di Pohuwato memiliki sejarah yang panjang. Namun dengan keterbatasan data ataupun sumber yang ada, maka akan dirasakan beberapa kendala, terutama dalam penggalian sumber yang sangat relevan dengan tulisan.

Selain etnik pribumi, di daerah Pohuwato terdapat beberapa etnik yang telah lama mendiami wilayah ini. Etnik tersebut antara lain, Bugis, Kaili (dari Sulawesi Tengah), Minahasa dan Jawa. Jika ditinjau dari perjalanannya sejarahnya, etnik Bugis merupakan pendatang dengan skala besar yang telah lama mendiami wilayah Gorontalo yaitu sejak peristiwa Perjanjian Bungaya (Hasanudin & Basri,2012:127), kemudian etnik ini menyebar sampai ke wilayah pedalaman Gorontalo salah daerah yang menjadi tempat persinggahannya adalah Pohuwato. Sedangkan Suku Kaili dan Minahasa proses kedatangannya sangat berbeda dengan suku Bugis. Motif kedatangan suku ini tidak tersangkut dengan masalah apa – apa atau suatu perjanjian tertentu, namun tujuan mereka tak lain adalah ingin meningkatkan taraf ekonominya dengan mencari pekerjaan di daerah Pohuwato, sehingga telah berdomisili di daerah ini. Dapat dindikasikan kedatangan suku Kaili dan Minahasa ini terkait dengan perluasan administrasi pemerintah (Joni Apriyanto,2012:7) sehingga mereka

bermigrasi hanya untuk mencari pekerjaan. Sedangkan kedatangan suku Jawa sudah merupakan program yang dijalankan pemerintah (Orde Baru) untuk menekan jumlah penduduk di daerah asalnya.

Pada masa Orde Baru, pemerintah dengan gencar-gencarnya melakukan perubahan tatanan pada suatu wilayah yang memiliki penduduk tertinggi. Dalam hal ini pulau Jawa yang merupakan bagian terbesar dari rencana itu. Sehingga berbagai cara yang dilakukan untuk melaksanakan pemindahan penduduk secara besar – besaran tersebut (dari Jawa ke daerah lain yang masih kurang penduduknya). Dengan luasnya wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Marauke sehingga pemerintah tidak akan mengalami kesulitan dalam menentukan daerah menjadi tujuan pokok penetapan masyarakat transmigrasi tersebut.

Selain itu, program ini ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi dan pertanian baru dalam rangka pembangunan daerah (Sri-Edi Swasono,1986). Daerah yang dimaksud adalah daerah yang menjadi tujuan utama dari transmigrasi tersebut. Sehinganya di harapkan masyarkarat transmigrasi ini mampu untuk mengelola daerah baru yang mereka tempati.

Kedatangan dan perkembangan kelompok etnik baru di Pohnpei memberikan warna baru dan perubahan sosial bagi penduduk pribumi dalam hal tradisi, budaya, dan ekonominya. Kelompok etnik baru ini dengan cepat mampu berasimilisi dengan penduduk asli. Hal ini terlihat dengan adanya pelaksanaan kegiatan budaya kelompok etnik baru yang sangat memberikan hiburan bagi

penduduk lokalnya. Di lihat dari kegiatan ekonominya, kelompok etnik baru ini mampu memberikan tambahan ekonomi bagi kas daerah Kabupaten Pohuwato. Sehingga bagi masyarakat lokal kelompok pendatang telah menjadi bagian dari masyarakat Pohuwato secara keseluruhan.

Oleh karena itu dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis mengambil judul tentang : ***Kolonisasi Etnis Bugis di Pohuwato Awal Abad XIX.***

B. Rumusan Masalah

Adapun dalam rumusan masalah, peneliti akan menguraikan masalah-masalah mengenai; (1) bagaimana proses transmigrasi kelompok Etnis Bugis di pohuwato; (2) bagaimana kolonisasi etnis Bugis di Pohuwato abad XIX.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) ingin mengetahui kolonisasi etnis Bugis di Pohuwato abad XIX; (2) mengetahui proses transmigrasi kelompok etnis Bugis di Pohuwato; dan (3) dapat mengetahui kelompok etnik Bugis menentukan kolonisasi di Pohuwato, sampai perkembangan kelompok etnis, perubahan sosial serta asimilasi dan interaksi kelompok etnik dengan masyarakat lokal di Pohuwato.

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat yang dapat dijadikan sebagai dasar agar penelitian ini dapat di pakai untuk penelitian-penelitian

selanjutnya. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan awal pada penelitian-penelitian selanjutnya, terutama bagi yang akan mengkaji tentang sejarah masyarakat yang ada di Pohuwato dan memberikan sumbangsi pemikiran bagi para penulis yang melakukan penelitian sejarah Gorontalo dan menambah pengetahuan peneliti tentang kolonisasi etnis bugis di Pohuwato. Selanjutnya menjadi acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam menulis sejarah lokal Indonesia terutama sejarah lokal Gorontalo.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian sejarah perlu di batasi oleh ruang lingkup temporal dan spasial. Hal ini di perlukan oleh penulis untuk memenuhi langkah-langkah penelitian agar memiliki arah yang jelas. Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah mengaitkan penelitian lebih mudah untuk di lakukan secara empiris, metodologis, dan dapat di pertanggung jawabkan.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah *temporal* dan *spasial*. Yang *pertama* secara temporal penelitian ini hanya di fokuskan pada abad awal abad XIX karena pada abad itu etnis bugis masuk ke daerah Gorontalo khususnya Kabupaten Pohuwato. *Kedua*, secara spasial penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pohuwato. Daerah ini adalah menjadi salah satu tempat orang-orang melakukan transmigrasi dari bebrbagai macam etnis khususnya etnis bugis.

E. Tinjauan Pustaka dan Sumber

Tinjauan pustaka atau Sumber-sumber untuk penelitian sejarah lokal ini di dapatkan melalui sumber tulisan. Sumber tertulis yaitu melalui kepustakaan, yang di lakukan di perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo. Perpustakaan daerah Gorontalo. Sumber-sumber itu terutama, sumber tertulis yang meliputi buku-buku dan literatur yang sangat berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kolonisasi etnis bugis di pohuwato serta makalah-makalah maupun laporan terdahulu yang ditulis oleh para sejarawan-sejarawan yang ada di wilayah lokal maupun nasional.

Adapun buku-buku yang membahas mengenai sejarah lokal yang ada di Gorontalo meliputi: buku yang di tulis oleh Joni Apriyanto dalam bukunya Sejarah Gorontalo Modern dari Hegemoni Kolonial Ke Provinsi yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Ombak 2012. Di dalam buku ini membahas tentang perkampungan-perkampungan yang ada di Gorontalo di dirakan bagi komunitas-komunitas pendatang antara lain, etnis Bugis (kampung Bugis), Makasar, Arab dan Pakistan (Joni Apriyanto,2012:8), sehingga dari uraian yang didapatkan dalam buku ini, kemudian akan dianalisis sampai pada penyebaran ke wilayah-wilayah di sekitar Kota Gorontalo.

Buku Hasanuddin dan Basri Amin di terbitkan di Yogyakarta oleh Ombak 2012. Buku ini menjelaskan tentang pengaruh Bugis dan Makasar yang berkaitan dengan perjanjian Bongaya di mana arus migrasi memberikan skala besar ke daerah Gorontalo samapai Kalimantan Timur. Di mana komunitas Bugis dan Makasar harus

meninggalkan daerah-daerah yang sudah menjalin lama dengan daerah niaga, bahkan daerah ini pernah bi bawah pengaruhnya termasuk Gorontalo.

Pembentukan perkampungan Bugis di awali dari permintaan raja Monoarfa *apitalau* meminta bantuan pada orang-orang Bugis untuk mengusir para bajak laut yang berkeliaran di Gorontalo.

Selanjutnya dalam buku yang di uraikan oleh Hasanuddin yang berjudul *Pelayaran dan perdagangan Orang Bugis dan Mandar Di Kawasan Teluk Tomini* di terbitkan oleh Amara Books 2016. Buku ini membahas Etnis Bugis dan Mandar bahwa kehidupan mereka adalah pelaut sebagai sumber kehidupan mereka, selain itu juga bahwa laut merupakan penghubung untuk mereka sebagai jalur lalu lintas untuk melakukan perdagangan, dan juga mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal sehingganya mereka bisa di terimah dengan baik oleh masyarakat lokal.

Penelitian mengenai orang Jawa baik transmigrasi maupun perantauan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya namun penelitian itu berbeda lokasi Kabupaten tetapi masih di Provinsi Gorontalo. Namun yang akan diuraikan pada penelitian ini hanyalah beberapa yang dianggap sangat relevan dengan penelitian ini diantaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Novrimanto Akutali pada tahun 2014. Penelitian ini berjudul *Etnik Jawa di Tolangohula (Tahun 1973 – 2013) : Studi Sejarah Sosial*.

Penelitian ini adalah Skripsi di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Jika dilihat dari judul penelitiannya akan ditemukan perbedaan dengan penelitian ini. Dalam uraian hasil penelitian Novrimanto Akutali

banyak membahas bagaimana transmigrasi masuk di Kecamatan Tolangohula, tentu tidak terlalu mengherankan mengingat etnis Jawa yang ada di Tolangohula merupakan transmigran dari pulau Jawa. Penelitian tersebut fokus pada kehidupan sosial etnis Jawa di Kecamatan Tolangohula. Tentu sangat berbeda dengan penelitian ini yang secara substansial ingin meneliti perbandingan karakteristik orang Jawa transmigrasi di Desa Sidomulyo dan Desa Sidodadi dengan orang Jawa perantauan yang ada di Kota Gorontalo.

Kurangnya penelitian yang dilakukan mengenai perbedaan karakteristik orang Jawa transmigrasi dengan orang Jawa perantauan telah mengilhami dilaksanakannya penelitian ini guna menutupi kekurangan – kekurangan pada penelitian – penelitian sebelumnya.

Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siskawati yang berjudul Palilati, 2014. *Karakteristik Orang Jawa Transmigrasi dan Orang Jawa Perantauan : Studi Komparasi di Gorontalo*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan karakteristik orang Jawa Transmigrasi dan Orang Jawa Perantauan di Gorontalo, jadi lebih di fokuskan pada karakteristik orang Jawa yang merupakan etnik baru atau masyarakat transmigrasi. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan masyarakat Jawa yang tinggal di Kabupaten Pohuwato.

Perbedaan tulisan saya dengan Novrimanto Akutali adalah Kalau skripsi Novrimanto Akutali hanya membahas mengenai *Etnik Jawa Di Tolangohula (Tahun 1973 – 2013) : Studi Sejarah Sosial*. Maka dalam penelitian ini penulis membahas

mengenai seluruh kelompok etnik yang ada di Kabupaten Pohuwato baik etnik Jawa, Bugis dan lain sebagainya.

F. Kerangka Konseptual dan Pendekatan

Sebelum mengemukakan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini, akan dijelaskan terlebih dahulu apa kegunaan dari pemakaian teori dalam penelitian tersebut.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian. Suatu penelitian tanpa menggunakan teori bisa saja dilakukan, akan tetapi permasalahan tersebut tidak akan berkembang dan hanya bergerak searah saja. Tanpa melihat kausalitas dari permasalahan tersebut. Sehingga pengungkapannya tidak akan dalam dan hanya monoton pada satu arah saja. Suatu teori adalah semacam generalisasi. Generalisasi adalah proposisi yang menjadikan dua atau lebih kelas fenomena saling berhubungan. Maka teori apapun yang digunakan harus melaksanakan fungsi ganda. Pertama, menjelaskan fakta yang sudah diketahui, dan kedua, membuka celah pandangan baru yang dapat mengantarkan kita menemukan fakta baru pula.

Menurut Chris Barker (2013:35) teori dapat dipahami sebagai narasi yang berusaha membedakan dan menjelaskan ciri – ciri yang mendefinisikan dan menjelaskan terus – menerus kejadian yang dipersepsikan. Namun teori tidak menggambarkan dunia secara akurat, karena teori hanya merupakan alat, instrument dan logika untuk mengintervensi dunia melalui mekanisme deskripsi, definisi prediksi dan kontrol.

Penelitian ini menggunakan teori sosial dalam menganalisis objek permasalahan. Pendapat Bryan S. Turner (2012:20) bahwa teori sosial menyediakan kerangka filsafat dan analisis yang diperlukan untuk mengembangkan ilmu – ilmu pengetahuan sosial. Teori sosial melestarikan prestasi – prestasi masa lalu, mencatat berbagai kebutuhan dan keterbatasan masa kini, dan memandu jalan kepenelitian tentang berbagai isu dan persoalan masa depan. Selanjutnya ia menambahkan bahwa yang membentuk teori sosial adalah sebuah tugas yang rumit, tetapi tugas ini dibuat lebih mudah dengan melihat beberapa contoh sejarah. Bryan (2012:70) memilah tiga arti fundamental teori sosial. Definisi pertama menyebut teori sosial sebagai upaya untuk memahami watak dan sifat masyarakat dan bagaimana masyarakat bekerja. Kedua, yaitu pengembangan teori – teori normative tentang apa yang akan atau seharusnya membentuk suatu sebagai “masyarakat yang baik. Ketiga ia menyatakan bahwa teori – teori sosial kerap merupakan bagian dan paket ideologi – ideologi politik.

Melihat fungsi dan kegunaan teori dan teori sosial maka peneliti menetapkan teori Perubahan Sosial dan Gerakan Sosial dalam menganalisis kehidupan kelompok Etnik di Pohuwato.

1. Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup system sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan system tertentu dalam jangka waktu berlainan. Jadi konsep dasar perubahan sosial

mencakup tiga gagasan (1) perbedaan; (2) pada waktu yang berbeda; dan (3) diantara system sosial yang sama. Sztompka (2014:3-4) membedakan perubahan sosial menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatan: apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi – dimensi system sosialnya. Ini disebabkan keadaan system sosial itu tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai komponen sebagai berikut: (1) Unsur – unsure pokok (misalnya: jumlah dan jenis individu serta tindakan mereka); (2) Hubungan antar unsur (misalnya: ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, hubungan antar individu dan integrasi); (3) Berfungsi unsur – unsure di dalam system (misalnya: peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu atau diperlukan tindakan tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial), (4) Pemeliharaan batas (misalnya: criteria untuk menentukan siapa saja yang termasuk anggota system, syarat penerimaan individu dalam kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi dan sebagainya); (5) Subsistem (misalnya: jumlah dan jenis seksi, segmen atau devisi khusus yang dapat dibedakan); dan (6) Lingkungan (misalnya: keadaan alam atau lokasi geopolitik).

Konsep Sztompka lebih menitik beratkan pada perubahan system dalam masyarakat. Olehnya itu dalam penelitian kelompok etnis di pohuwato penulis akan menganalisis berbagai macam perubahan sosial yang di tinjau dari system sosial masing – masing kelompok etnik. Pertanyaan besar adalah: apakah kelompok etnik ini akan mengikuti system sosial masyarakat lokal atau mereka (kelompok etnik)

mempertahankan system sosial daerah asalnya masing-masing.Selanjutnya Seperti yang dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo (1992:159-160):

Salah satu tema pokok dari bidang sejarah sosial sudah barang tentu ialah perubahan sosial, suatu konsep yang sangat luas cakupannya. Sesungguhnya proses sejarah dalam keseluruhannya, apabila dipandang dari perspektif sejarah sosial, merupakan proses perubahan sosial dalam pelbagai dimensi atau aspeknya.

Berdasarkan pendapat diatas, maka perubahan sosial merupakan keseluruhan dari proses kehidupan sosial manusia. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sosial tidak pernah lepas dari perubahan sosial. Hal ini tidak mengherankan sebab sifat manusia yang selalu dinamis dalam kehidupannyaakan menjadi faktor terjadinya sebuah perubahan. Dengan demikian, maka perubahan – perubahan sosial yang dialami oleh kelompok etnis di Kabupaten Pohuwato menjadi bagian penting untuk diketahu i demi pemahaman kehidupan sosial yang lebih lengkap lagi. Konsep perubahan sosial sangatlah luas dan beragam, sehingga diperlukan penyederhanaan konsepnya karena tidak semua perubahan sosial relevan dengan yang dialami oleh suku Gorontalo selama ini.

Menurut Sartono Kartodirdjo (2013:5):

Perubahan sosial mencakup permasalahan – permasalahan diantaranya adalah proses akulturasi yang merupakan suatu proses yang mencakup usaha masyarakat menghadapi pengaruh kultural dari luar dengan mencari bentuk penyesuaian terhadap komunitas, nilai, atau ideologi baru, suatu penyesuaian berdasarkan kondisi, disposisi, dan referensi kulturalnya yang kesemuanya merupakan faktor – faktor kultural yang menentukan sikap terhadap pengaruh

baru. Sebagai konsekuensi terhadap pengaruh baru, maka masyarakat yang tadinya lebih homogen menjadi heterogen. Salah satu dampak dari situasi itu ialah timbulnya konflik sosial, suatu gejala yang menyertai perubahan sosial.

Sartono Kartodirdjo (2013 : 7) juga menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan gejala yang interen dalam setiap perkembangan atau pertumbuhan (*development*). Teori developmentalisme menggambarkan bahwa masyarakat mengalami pertumbuhan atau perkembangan, suatu proses yang analog dengan proses organis, tidak hanya adanya tambahan besarnya entitas, tetapi juga meningkatnya kemampuan serta kapasitas untuk mempertahankan eksistensi, adaptasi terhadap lingkungan, serta lebih efektif mencapai tujuannya.

Penelitian kelompok etnik di Kabupaten Pohuwato ini akan melihat bagaimana perubahan-perubahan sosial yang dialami oleh kelompok etnik maupun masyarakat lokal Pohuwato. Perubahan sosial yang dimaksud meliputi permasalahan akulturasi, konflik, dan juga perkembangan dalam kehidupan sosial.

Perubahan sosial yang terjadi tidak lepas dari bagaimana interaksi sosial terjadi antara suku Mongondow dengan kekuatan dari luar. Sehingga teori tentang interaksi sosial sangat diperlukan untuk menganalisis pola interaksi yang terjalin pada suku Mongondow. Dalam kehidupan manusia, interaksi sosial menjadi faktor penting sebab syarat utama terjadinya aktivitas – aktivitas sosial adalah interaksi sosial itu sendiri. Menurut Gillin dan Sujono Soekanto (2006:55-64):

Bahwa ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat dari interaksi sosial yaitu proses yang sifatnya asosiatif dan proses yang sifatnya disosiatif. Proses yang asosiatif merupakan suatu proses yang bisa dikatakan mengarah pada kerjasama ataupun perpaduan sedangkan proses yang sifatnya disosiatif merupakan proses yang mengarah pada pertentangan ataupun konflik. Dalam hal ini peneliti akan melihat bentuk kerjasama yang terjadi antara kelompok etni baru dengan kelompok masyarakat lokal. Dan jika dalam penelitian lebih lanjut akan mendapatkan sumber mengenai konflik, maka penulis akan mengembangkan teori konflik sebagai bahan analisis lebih lanjut.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa teori digunakan sebagai pisau analisis. Maka penulis menggunakan teori perubahan sosial sebagai pisau untuk membedah permasalahan yang terjadi dalam kelompok etnik baru dan masyarakat lokal Gorontalo, terutama awal kedatangan (transmigrasi) sampai mencari kolonisasi yang tepat untuk ditinggali yang tidak lepas dari bantuan serta peran dari masyarakat lokal.

2. Pendekatan Sejarah Lisan

Selain mengolah dan mencari sumber tertulis yang berupa catatan sejaman, arsip dan buku sebagai sumber rujukan utama, penulis juga mengandalkan sejarah lisan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai sejarah perkembangan kelompok etnis di Kabupaten Pohuwato. Metode lisan sangat penting karena informasi yang didapatkan melalui wawancara lisan dapat di jadikan bahan perbandingan dengan data tertulis.

Wawancara lisan dalam sejarah menyediakan bukti yang lebih lengkap. Dengan metode ini maka juga akan mendapatkan gambaran yang kolektif dari

suatu kelompok masyarakat. Selain itu juga metode lisan merupakan suatu metode yang tidak memandang status si narasumber. Sehingga sekali lagi dengan metode ini maka akan di dapatkan model sejarah yang lebih ke “masyarakat”. Thompson (2012:86-87) membagi bukti lisan ke dalam dua pengaruh yang berbeda. Pertama sebagai suplemen dan pengoreksi sumber – sumber yang sudah ada. Kedua dalam membuka persoalan – persoalan baru untuk dipertimbangkan. Sehingga fungsi sejarah lisan dapat menjadi alat pengoreksi data – data yang telah ada, dalam artian data tersebut telah di tulis namun sangat kontradiksi (bertentangan dengan kejadian sebenarnya).

Sejarah lisan sangat berbeda dengan tradisi lisan. Sejarah lisan lebih mengarah pada peroleh suatu fakta sejarah melalui wawancara lisan, namun si narasumber tersebut masih mengalami atau melihat langsung peristiwa sejarah yang terjadi tersebut. Sedangkan tradisi lisan lebih kepada fakta atau peristiwa sejarah yang telah lampau dari beberapa generasi yang tidak melihat langsung, tetapi sangat mengetahui peristiwa sejarah tersebut. Sehingga yang di andalkan dalam tradisi lisan adalah suatu generasi yang mewarisi cerita sejarah tersebut.

Menurut Vansina Jan (2014:43) signifikansi sosialnya adalah dari sejumlah tradisi lisan nampak dalam system – system yang dipercaya dalam menyampaikan tradisi – tradisi dari satu generasi ke generasi lainnya. Tradisi lisan menurut Jan Vansina merupakan pesan – pesan verbal yang merupakan kalimat – kalimat laporan

dari masa lalu yang melampaui masa kini. Pesan – pesan tersebut harus pesan lisan yang di ucapkan, dinyanyikan, disebutkan dengan alat musik dan lain sebagainya.

Sejarah lisan dan tradisi lisan sangat memberikan bantuan bagi sejarawan yang ingin meneliti suatu daerah yang tidak memiliki bukti sejarah dalam bentuk tulisan. Sehingga mau atau tidak untuk mendapatkan sejarah dari masyarakat tersebut harus dilakukan secara lisan melalui wawancara lisan. Komplementer (saling mengisi) dari kedua metode lisan tersebut tidak dapat dipisahkan, keduanya saling beriringan satu dengan lainnya. Sehingga dalam pencapaian informasinya akan nampak komplis dan keabsahan faktanya dapat dipercaya. Begitu juga dalam mendapatkan data dan informasi mengenai sejarah kedatangan kelompok etnis di kabupaten Pohuwato. Untuk menambah keabsahan dan fakta lainnya harus menggunakan tehnik tersebut.

3. Konsep Etnis, Transmigrasi dan Perkembangannya

Chon Bernard (1985:229) mengemukakan bahwa etnis merupakan kerja lapangan etnografis yang melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. Tujuan dari penelitian etnis adalah melihat pada system – system sosial dan nilai – nilai budaya bangsa – bangsa pribumi, dengan melihat kondisi suku – suku terkait dengan berbagai macam perubahan sosial didalamnya. Penelitian etnis juga melihat pada kesatuan – kesatuan budaya masyarakat tertentu. Pendekatan dan persoalan karakteristik sejarah etnis tergantung dari sifat masyarakat yang sedang diteliti. Sejarawan etnis biasanya memiliki pengalaman lapangan dari daerah tersebut,

pengalaman ini menambah pengetahuannya mengenai masyarakat tertentu dan bagaimana sebenarnya masyarakat tersebut berfungsi. Chon Bernard (229-230) berpendapat bahwa ethnohistory di lihat peristiwa – peristiwa sejarah dari sudut pribumi dan tidak dari sudut penguasa. Makah hal ini tidak beda dengan kegunaan sejarah lokal yang melihat sejarah lebih ke “masyarakat” tanpa perspektif penguasa.

Chris Barker (2013:25) mengemukakan:

Etnis/etnisitas sebagai konsep cultural yang terpusat pada kesamaan norma, nilai, kepercayaan, symbol dan praktik cultural. Terbentuknya suku bangsa bersandar pada penanda cultural yang dimiliki secara bersama yang telah berkembang dalam konteks historis, sosial dan politis tertentu dan yang mendorong rasa memiliki yang sekurang-kurangnya didasarkan pada nenek moyang mitologis yang sama. Hal ini yang dilakukan oleh kelompok etnis di pohnoh. Mereka membangun wacana bahwa mereka juga merupakan bagian dari eksistensi masyarakat lokal. Sehingga dengan mudah masyarakat lokal berbaur dengan kelompok etnis pendatang ini.

Menurut pendapat Berker Chris (2013:25) transmigrasi secara umum dipahami sebagai perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya ke tempat yang jarang penduduknya. Dalam konteks kebijakan, transmigrasi adalah kebijakan pemerintah memindahkan penduduk dari pulau – pulau dalam Indonesia berpenduduk padat (Jawa, Madura, Bali, dan Lombok) ke pulau – pulau luar yang dianggap berpenduduk jarang. Transmigrasi dimulai pada tahun 1902 sebagai bagian dari politik etis. Hingga 1931 jumlah transmigran pertama di Lampung telah mencapai 36.000 jiwa. Setelah kemerdekaan, transmigrasi sering dilihat sebagai obat mujarab penyembuh masalah pedesaan Jawa dan pada 1952 disusun rencana luar

biasa untuk menggunakannya mengurangi jumlah penduduk Jawa (yang saat itu berjumlah 50 juta) menjadi 31 juta pada 1987. Sukarno kembali mengumumkan target pemukiman sebesar 1,5 juta per tahun pada 1964. Dan Suharto menaikkannya menjadi 2 juta pada tahun 1966. Namun, kenyataannya tidak lebih dari 340.000 orang yang dipindahkan dari Jawa ke Sumatera antara 1950 dan 1965. Antara 1969 dan 1982 sekitar 1 juta orang dipindahkan, dan pada waktu yang sama jumlah penduduk Jawa – Madura bertambah sebesar 17 juta.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1972 (tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi, pasal 1), transmigrasi adalah pemindahan dan/atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan Pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Pengertian transmigrasi dalam UU No. 29 Tahun 2009 adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Interpretasi terhadap definisi tersebut bahwa pembangunan transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk merekayasa ruang atau wilayah agar mempunyai nilai tambah dan daya tarik bagi penduduk untuk mendatangnya, bertempat tinggal di dalamnya, dan untuk bekerja-berusaha guna meningkatkan kesejahteraan. Menurut Herry Heriawan (2015-2019: 1) masyarakat transmigrasi, baik para pendatang ataupun masyarakat

(penduduk lokal), yang berada di satuan-satuan permukiman dalam kawasan transmigrasi, merupakan entitas kehidupan sosial sebagai subyek, pionir, sekaligus pemanfaat pembangunan transmigrasi. Jadi sebenarnya pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia memiliki tujuan yang mulia bagi kemanusiaan secara kontekstual.

Pembangunan transmigrasi telah berhasil menciptakan wilayah-wilayah baru berbasis komoditas unggulan, baik sebagai pusat pertumbuhan baru, maupun sebagai pendukung pusat pertumbuhan yang telah ada, sehingga mempercepat pembangunan daerah. Melalui pembangunan transmigrasi selama ini, telah terbentuk 3.052 desa, 382 kecamatan, 104 (kabupaten-kota), dan satu ibu kota provinsi). Hingga saat ini, tercatat sekitar 2 (dua) juta keluarga atau 10 jutaan jiwa, yang difasilitasi langsung untuk bermukim, bekerja atau berusaha di kawasan transmigrasi), sementara itu terdapat sekitar 20 jutaan jiwa yang merupakan generasi berikutnya. Jalan telah terbangun sepanjang 50.025 Km, jembatan 40.551 Km, ribuan sekolah dasar dan pusat kesehatan desa hingga dermaga dibangun. Kehadiran transmigrasi di bumi nusantara ini juga telah memperkuat nilai-nilai persatuan bangsa dan merekatkan kesatuan wilayah serta memperkaya kemajemukan budaya.

Mengingat tujuan program transmigrasi sangat penting untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia dan tujuan utamanya adalah untuk menyejahterakan penduduk, tetapi Bayu Setiawan berpendapat bahwa (2011: 177) keberadaan program ini perlu dipertahankan dan dikembangkan. Keberhasilan program transmigrasi pada masa lalu dapat dijadikan contoh untuk pengembangan

program ini pada masa yang akan datang. Pada sisi lain, kegagalan program ini banyak menimbulkan kritik yang pada dasarnya mengatakan bahwa keberadaan program ini hanya untuk memindahkan kemiskinan dan bukan untuk menyejahterakan penduduk.

Salah satu kritik mendasar yang selama ini dilontarkan terhadap pembangunan transmigrasi di Indonesia menyangkut masalah program transmigrasi. Dari berbagai macam pendapat tentang transmigrasi namu Siswono Yudohusodo (1998:3) ia pengkritik dan menyatakan, alasan dan semangat yang melandasi program transmigrasi masih bertumpu pada masalah kependudukan (demografi – sentris). Hingga saat ini kesan kuat bahwa banyak orang melihat program transmigrasi sebagai upaya memindahkan penduduk miskin dari pulau Jawa. Kemiskinannya itu kata mereka disebabkan oleh terlalu padatnya penduduk di pulau yang sejak dulu menjadi pusat kehidupan bangsa berpenduduk terbanyak nomor empat di dunia itu. Kesan tersebut bahwa kesan tersebut menjadi lebih menonjol lagi karena program – program yang disediakan serta targetnya selalu dinilai dan dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, berapa jumlah penduduk miskin yang berhasil dipindahkan melalui program yang disiapkan. *Kedua*, seberapa jauh taraf hidup dari penduduk yang dipindahkan itu dapat ditingkatkan. Kedua sudut pandang itu digunakan untuk melihat apakah program yang disiapkan berjalan efektif.

Jika ditinjau dalam perspektif sejarah, pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Menurut Patrice Levang (2003) bahwa pada tahun 1905 Asisten Residen yang saat itu dijawab oleh Heijting mengirimkan

satu rombongan yang terdiri atas 155 kepala keluarga dari Karasidenan Kedu (Jawa Tengah) ke Geong Tataan (Lampung). Di tempat itu para pendatang membangun desa diberi nama Bagelen, desa *kolonisatie* pertama. Empat desa lainnya dibangun antara tahun 1906 dan 1911. Setiap kepala keluarga memperoleh 70 are sawah dan 30 are pekarangan. Biaya transportasi, bahan bangunan, peralatan, dan jaminan hidup selama 2 tahun ditanggung oleh proyek. Inilah awal dari pelaksanaan transmigrasi di Indonesia yang kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan presiden Soekarno dan lebih intens lagi dilaksanakan pada masa pemerintahan presiden Soeharto.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah metode penelitian sejarah. (Gosttschalk 1997:17) pengertian metode penelitian sejarah disini adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam penelitian ini mengikuti tahapan-tahapan metode sejarah seperti dalam buku Helius Sjamsudin (2012:67) dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama ialah : apa yang di sebut heuristik (*heuristics*) atau dalam bahasa Jerman *Quelenkunde*, sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Dalam tahap ini peneliti berusaha mengumpulkan berbagai macam sumber dan literatur yang sangat berhubungan dengan permasalahan penelitian baik itu sumber primer maupun sumber sekunder yang di dapatkan perpustakaan daerah provinsi Gorontalo, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Gorontalo serta perpustakaan Limboto. Sumber-sumber

tersebut adalah sumber yang berhubungan dengan sejarah lokal Gorontalo khususnya mengenai kolonisasi etnis bugis di Pohuwato awal abad XIX.

Kedua dari buku *langlois* dan *seignobos* adalah apa yang disebut “ kegiatan-kegiatan analitis (operations analttiques; analytical; kritik) yang harus di tampilkan oleh sejarawan terhadap dokumen-dokumen setelah mengumpulkan mereka dari arsip-arsip. Fungsi dan tujuan kritik sumber adalah dalam kebutuhannya peneliti membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil. Serta dapat menyeleksi sumber-sumber yang telah terkumpul.

Dalam metode sejarah di kenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal. Adapun kritik eksternal dan internal adalah sebagai berikut:

1. Kritik eksternal

Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Apakah sumber-sumber sejarah yang telah di kumpulkan pada tahap pertama tadi bersifat *authentic* atau tidak sehingga menjadi bahan pertimbangan ketika akan melakukan Historiografi atau penulisan sejarah tersebut.

2. Kritik Internal

Kebalikan dari kritik eksternal, kritik internal sebagaimana yang telah di sarankan oleh istilahnya menekankan aspek “dalam” yaitu isi atau materi dari sumber yang telah di kumpulkan sebelumnya.

Dalam tahap ini peneliti memeriksa isi dari materi yang telah di kumpulkan. Apakah materi-materi tersebut bersifat independen atau tidak, jika tidak maka penulis bisa meragukan materi yang telah tersedia tersebut.

Ketiga tahapan interpretasi. Yaitu sesudah menyelesaikan langkah-langkah pertama dan kedua berupa heuristik dan kritik sumber seperti yang sudah di jelaskan di depan, sejarah memasuki langkah-langkah selanjutnya yaitu penafsiran atau interpretasi. Setelah sumber-sumber terkumpul dan telah melalui tahap kritik langkah selanjutnya yaitu peneliti melakukan penafsiran kepada sumber-sumber yang tersedia tersebut. Karena sumber-sumber yang telah terkumpul tersebut bersifat bisu. Sehingga butuh penafsiran agar sumber-sumber tersebut dapat menjadi suatu rangkaian penulisan yang sudah tersistematis dengan baik.

Ke-empat yaitu penjelasan (eksplanasi). Setelah melewati tahap-tahap sebelumnya dan telah terselesaikan dengan baik maka peneliti akan menjelaskan satu-persatu sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian tentang Etnis Bugid di pohuwato. Sehingga akan berakhir pada yang ke lima.

Ke-lima yaitu penyajian, apapun wujud penampilan, penyampaian, atau pemaparannya, ketiga bentuk penyajian yaitu deskriptif, naratif, analitis-kritis atau gabungan di antar keduanya, semuanya tetap bermuara kepada sintesis yang kita kenal dengan historiografi. Setelah melewati semua tahap-tahap sebelumnya maka peneliti akan menyajikan sumber-sumber tersebut dalam bentuk sebuah tulisan yang terarah dan tersistematis sesuai dengan metodologi yang telah di gunakan.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 bulan, dimulai dari langkah persiapan administrasi, pengumpulan data, pengolahan data, dan terakhir adalah penyusunan laporan. Untuk lebih jelasnya penelitian ini dilakukan melalui tahapan – tahapan berikut : Tahap persiapan selama 1 Bulan, tahap Pengumpulan Data selama 1 Bulan, tahap Analisis Data selama 1 Bulan dan tahap Penyusunan Laporan selama 1 Bulan.

Mengenai waktu penelitian tentunya masih bisa berubah sesuai dengan pengumpulan data dilapangan nanti. Akan tetapi, tahap – tahap penelitian ini tidak akan mengalami perubahan karena sesuai dengan pedoman penelitian ilmiah. Maksudnya adalah rentang waktu bisa berubah dari 1 bulan menjadi 3 atau 4 bulan tetapi tahap-tahapnya tetap berdasarkan empat tahap seperti dijelaskan diatas. Secara lebih rinci, jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Kegiatan Penelitian	Bulan		
		Maret	April & Mei	Juni
1.	Persiapan	✓		
2.	Pengumpulan & Analisis Data		✓	
3.	Penyusunan Laporan			✓

I. Sistematika penelitian

Agar lebih terarah penulisan ini, maka perlu mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka dan sumber, kerangka teori dan pendekatan, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pohnato Abad XIX yang meliputi keadaan geografi dan iklim, keadaan penduduk dan dinamika masyarakat Pohnato, lingkungan dan pemukiman, potensi ekonomi dan pertambangan dan sistem pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat Pohnato, bahasa daerah Pohnato dan sejarah singkat Pohnato

Bab III Diaspora Masyarakat Bugis meliputi awal kedatangan masyarakat Bugis di Gorontalo dan persebaran masyarakat Bugis di Gorontalo. Bab IV kolonisasi etnis Bugis di Pohnato Abad ke-19 meliputi awal kedatangan masyarakat Bugis di Pohnato dan Pola Hidup dan Interaksi Sosial Masyarakat Bugis. Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran

